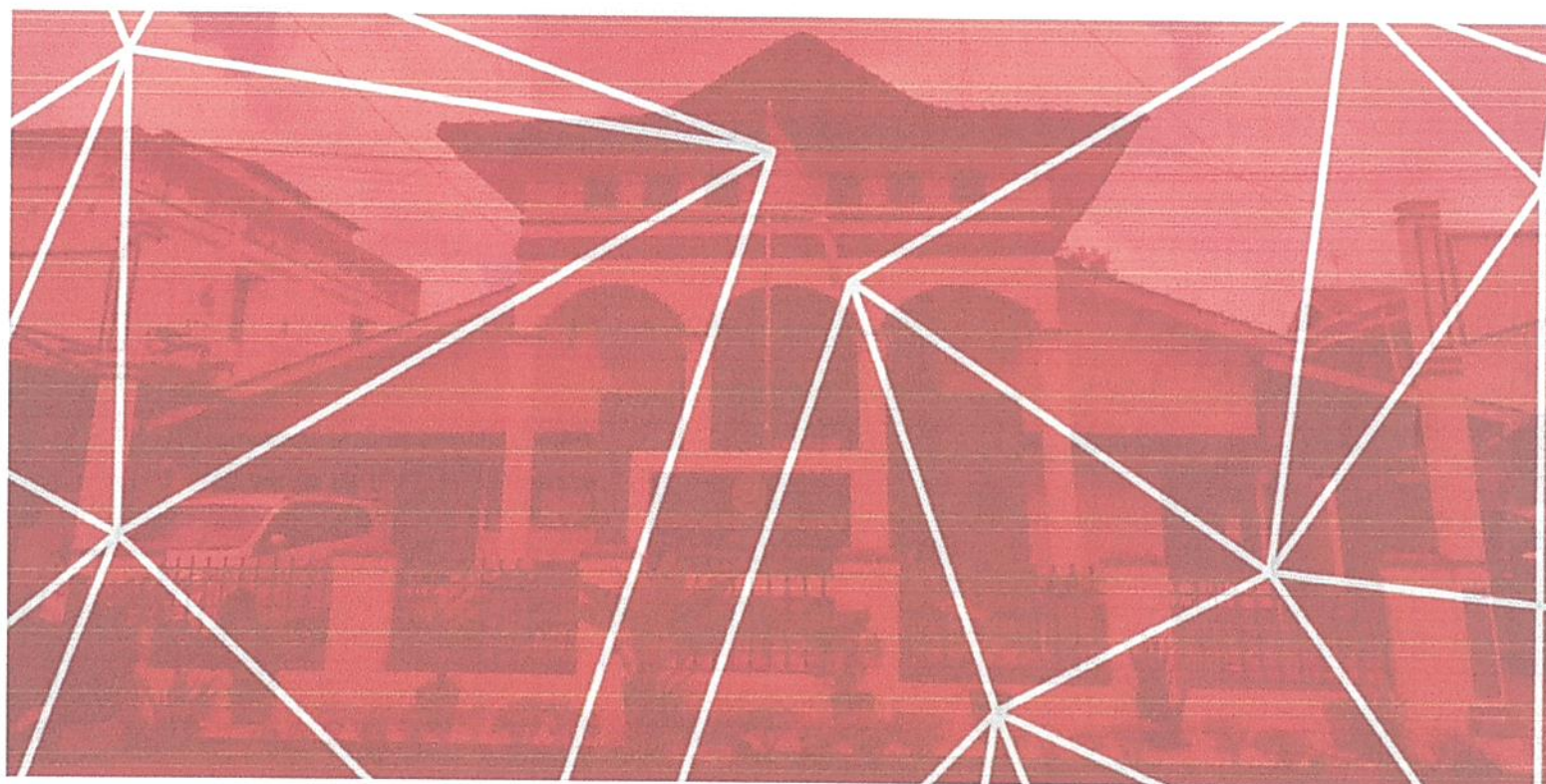




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JL. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN
TELP/FAX. (0711) 5723669

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2021. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan juga surat dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/5043/OT.01.1/XII/2021 tanggal : 28 Desember 2021 Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2021, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Pangkalan Balai, 03 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



SILVI ARIANI, S.H., M.H.

NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	5
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	5
B. Penyelesaian Perkara	6
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	6
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	7
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	8
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.....	9
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	9
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)	9
1. Posbakum.....	9
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	10
3. Perkara Prodeo.....	10
BAB III Sumber Daya Manusia	11
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	11
A. Mutasi	17
B. Promosi	17
C. Pensiun	18
D. Diklat	18
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana & TI	22
A. Pengelolaan Keuangan.....	22
1. Dipa Badan Urusan Administrasi	22

	2. Dipa Dirjen Badilum.....	23
	B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	24
	1. Gedung Dan Bangunan.....	24
	2. Rumah Dinas.....	27
	3. Kendaraan Bermotor.....	27
	4. Fasilitas Perkantoran	27
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	27
	1. Implementasi e-Court.....	28
	2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....	29
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	30
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	30
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	30
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	31
BAB VI	Pengawasan.....	38
	A. Internal.....	39
	B. Evaluasi.....	41
BAB VII	Penutup.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Rekomendasi.....	42

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum Kabupaten Banyuwasin.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”**. Dalam upaya untuk

mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat juga selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal

yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021.

BAB II



BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2021 sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2020	PERKARA MASUK 2021	PERKARA YANG PUTUS/ CABUT 2021	SISA PERKARA 2021
1.	Pidana Biasa	115	502	521	96
2.	Pidana Anak	-	22	22	-
3.	Pidana Singkat	-	-	-	-
4.	Pidana Cepat	-	10	10	-
5.	Praperadilan	-	7	7	-
6.	Lalulintas	-	2201	2201	-
7.	Perdata Gugatan	22	33	41	14
8.	Perdata Bantahan	-	-	-	-
9.	Perdata Gugatan Sederhana	1	31	30	2
10.	Perdata Permohonan	1	27	27	1

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN BANDING	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	22	19	1	2
2.	Pidana Anak	1	1	-	-
3.	Perdata Gugatan	11	9	1	1
4.	Perdata Bantahan	1	-	-	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN KASASI	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	17	5	1	10
2.	Pidana Anak	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	7	-	-	7
4.	Perdata Bantahan	-	-	-	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN PK	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	-	-	-	-
2.	Pidana Anak	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	-	-	-	-
4.	Perdata Bantahan	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2020 yang diputus pada tahun 2021 sebagai berikut :

a. Perkara Pidana

	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2020	PUTUS	SISA PERKARA 2021
1.	Pidana Biasa	115	115	-
2.	Pidana Anak	-	-	-
3.	Pidana Singkat	-	-	-
4.	Pidana Cepat	-	-	-
5.	Praperadilan	-	-	-
6.	Lalulintas	-	-	-

b. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2020	PUTUS	SISA PERKARA 2021
1.	Perdata Gugatan	22	22	-
2.	Perdata Bantahan	-	-	-
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	1	-
4.	Perdata Permohonan	1	1	-

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**a. Perkara Pidana**

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Pidana Biasa	502	406
2.	Pidana Anak	22	22
3.	Pidana Singkat	-	-
4.	Pidana Cepat	10	10
5.	Praperadilan	7	7
6.	Lalulintas	2201	2201

b. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Perdata Gugatan	31	18
2.	Perdata Bantahan	2	1
3.	Perdata Gugatan Sederhana	31	29
4.	Perdata Permohonan	27	26

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1.	Pidana Biasa	499	504	521
2.	Pidana Anak	21	22	22
3.	Perdata Gugatan	29	33	40
4.	Peradatan Bantahan	-	1	1

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1.	Perdata Gugatan	33	1

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
1.	Pidana Anak	22	3

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2021 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 240 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggandeng Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Bhakti Pertiwi.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker yang baru dibentuk pada tahun 2018, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum dapat melaksanakan kegiatan persidangan keliling dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN. Pada tahun 2021 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

BAB III
SUMBER DAYA
MANUSIA



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai hingga laporan ini dibuat berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) Orang personil yang terdiri dari 8 (Delapan) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 9 (Sembilan) Orang Pejabat Fungsional, 9 (Sembilan) Orang Pelaksana dan 8 (Delapan) Orang Pegawai PPNPN. Berikut ini statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2021 :

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Hakim	6	-	-	-	-	3	3	-	-	-	6	-
4	Panitera	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	Panmud Hukum	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
7	Panmud Perdata	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Panmud Pidana	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
9	Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Ortala	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10	Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
12	Panitera Pengganti	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	7	-

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
13	Jurusita	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
14	Jurusita Pengganti	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
15	Pelaksana	9	-	-	3	3	3	-	-	-	5	4	-
Jumlah		34	-	-	4	4	16	10	-	-	5	27	2

Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 :

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
1	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Ketua	Pembina	IV/a	
2	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	IV/a	
3	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata	III/c	
4	M ALWI, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata	III/c	
5	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	
6	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	
7	AGEWINA, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	
8	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	Penata Muda	III/a	
9	YUSUF, S.H.	Panitera Tingkat Pertama	Penata Tk.I	III/d	
10	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
11	A HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda	Penata Tk.I	III/d	
12	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda	Penata Tk.I	III/d	

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
13	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H	Panitera Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
14	DWI INDAH ROSALINA, S.H, M.H.	Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	
15	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	
16	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk.I	III/b	
17	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19	FITRIANI, S.H	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
20	BRENDY SUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
21	SUWARMAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
22	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
23	MATHYAS ADINATA, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
24	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	Penata Muda	III/a	
25	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita Pengganti	Penata Muda	III/a	
26	ENDANG AZHARI	Bendahara Tingkat Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	
27	MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
28	MUTIARA SAPUTRI, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia	Penata Muda	III/a	
29	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
30	ZULPAN ARYANTO	Pengadministrasian Persuratan	Pengatur Tk.I	II/d	
31	ERA USTHI ANGGRAINI	Pengadministrasian Registrasi Perkara	Pengatur Tk.I	II/d	
32	DESTI DWI AMANDA, A.Md.	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
33	DEA ANGGITA, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pengatur	II/c	
34	ADE KURNIAWAN, A.MD.	Pengadministrasian Registrasi Perkara	Pengatur	II/c	

b. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer (PPNPN) yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERWANZA	Pengamanan	
2	FAISAL RIFA'I, A.Md	Pengemudi	
3	ABDUL HADI	Pramubakti	
4	M. FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	
5	M. RAMADHONI, S.H.	Pengamanan	
6	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	
7	TITAH ADELIA ROSY, S.H.	Pramubakti	
8	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	

c. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	2	6	8
2	Panitera	1	-	1
3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	1	-	1
8	Jurusita Pengganti	1	-	1
Jumlah		12	9	21

d. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	4	5	9
6	Tenaga Honoror (PPNPN)	5	3	8
Jumlah		12	9	21

e. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	-	2	2
2	Golongan III	17	10	27
3	Golongan II	2	3	5
4	Golongan I	-	-	-
5	Tenaga Honoror (PPNPN)	5	3	8
Jumlah		24	18	42

- Golongan IV

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
5	Pembina (IV/a)	-	2	2
Jumlah		-	2	2

- Golongan III

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Penata Tk.I (III/d)	4	-	4
2	Penata (III/c)	2	4	6
3	Penata Muda Tk. (III/b)I	7	4	11
4	Penata Muda (III/a)	4	2	6
Jumlah		17	10	27

- Golongan II

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pengatur Tk.I (II/d)	1	1	2
2	Pengatur (II/c)	1	2	3
3	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Jumlah		2	3	5

- Golongan I

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	-
4	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah		-	-	-

A. MUTASI

Selama tahun 2021 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Oelamasi	Wakil Ketua PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
2	BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai	Hakim PN Kab. Madiun	Mutasi Keluar
3	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Panmud Perdata PN Pangkalan Balai	Panmud Hukum PN Pangkalan Balai	Mutasi Intern
4	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panmud Hukum PN Pangkalan Balai	Panmud Perdata PN Pangkalan Balai	Mutasi Inter
5	ISNATA TAKASURI, S.H.	Panitera Pengganti PN Prabumulih	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
6	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Tanjung Pati	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk

B. PROMOSI

Selama tahun 2021 terdapat beberapa Hakim dan pegawai yang promosi jabatan, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.	Ketua PN Pangkalan Balai	Wakil Ketua PN Bangko Kls. IB	Promosi Jabatan
2	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Pangkalan Balai	Ketua PN Pangkalan Balai	Promosi Jabatan

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
3	HADI CANDRA, S.H.	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Panmud Pidana PN Sekayu	Promosi Jabatan
4	MATHYAS ADINATA, S.H.	Pelaksana PN Kayuagung	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Promosi Jabatan

C. PENSIUN

Dalam kurun waktu dari Januari s.d. Desember 2021 tidak ada baik itu hakim maupun non-hakim yang pensiun.

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	KET.
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2021 terdapat orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan diantaranya;

No.	Nama	Diklat Yang Diikuti	Tanggal Kegiatan
1	2	3	4
1.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M	Seminar Online Membangun Kerjasama Tim Peradilan dari Tempat Kerja Tahun Anggaran 2021	12 Januari 2021
2.	ENDANG AZHARI	Uji Kompetensi Seleksi Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan APBN dari Tempat Kerja Tahun 2021	21 s.d .22 Januari 2021
3.	SILVI ARIANI, S.H., M.H	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum Angkatan XII Tahun 2021	25 Januari s.d. 5 Maret 2021
4.	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Seminar Online "Coaching untuk Pimpinan"	8 Februari 2021

5.	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Seminar Online "Kreatif dan Inovatif	10 Februari 2021
6.	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gel. II Angkatan XXVII dari Tempat Kerja Tahun 2021	22 Februari s.d. 11 Juni 2021
7.	BRENDY SUTRA, S.H.	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gel. II Angkatan XXVII dari Tempat Kerja Tahun 2021	22 Februari s.d. 11 Juni 2021
8.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	1 s.d. 3 Maret 2021
9.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	1 s.d. 3 Maret 2021
10.	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Bimbingan Teknis Kepegawaian (Manajemen ASN) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	1 s.d. 3 Maret 2021
11.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	3 s.d. 5 Maret 2021
12.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	3 s.d. 5 Maret 2021
13.	ADE KURNIAWAN, A.Md	Bimbingan Teknis Rencana Program dan Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	3 s.d. 5 Maret 2021
14.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Bimbingan Teknis Umum dan keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	8 s.d. 10 Maret 2021

15.	RAHMAT JUNIANSYAH	Bimbingan Teknis Umum dan keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	8 s.d. 10 Maret 2021
16.	DEA ANGGITA, A.Md	Bimbingan Teknis Umum dan keuangan (Penatausahaan BMN dan Anggaran) Pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan	8 s.d. 10 Maret 2021
17.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Pelatihan Online Mentoring bagi Peserta PKP Gel. I Batch C MARI Tahun 2021	8 s.d.. 10 Maret 2021
18.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Pelatihan Online <i>English Effective Presentation</i> bagi Peserta PKA Gel. I Angk. III s.d. V kelas 3	15 s.d. 23 Maret 2021
19.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> melalui <i>E-Learning</i> Gel. I Gol.III Angk. VII dari Tempat Kerja Tahun 2021	5 April s.d. 19 Juli 2021
20.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Pelatihan Online <i>English Effective Presentation</i> bagi Peserta PKP Gel. I Angk. XVII s.d.XXV kelas 5	31 Maret s.d. 9 April 2021
21.	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	Pelatihan penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia	27 Mei s.d. 11 Juni 2020
22.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Pelatihan Online <i>English Effective Presentation</i> bagi Peserta Latsar Golongan III Gel. I Angk. XVII	16 Juni 2.d. 24 Juni 2021
23.	ADE KURNIAWAN, A.Md	Latsar CPNS MARI Gol. II Gel. II Angk. III	21 Juli s.d. 12 Oktober 2021
24.	DEA ANGGITA. A.Md	Latsar CPNS MARI Gol. II Gel. II Angk. III	21 Juli s.d. 12 Oktober 2021
25.	BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.	Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gel. 3 Seluruh Indonesia	26 Juli s.d. 4 September 2021

26.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Pelatihan Online Tehnik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (<i>Excecutive Summary</i>) Batch 10	2 s.d. 3 Agustus 2021
27.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	E- Learning Penyegaran PPK Kementerian/Lembaga Tahun 2021	4 s.d. 8 Oktober 2021
28.	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Palembang	23 s.d. 25 Agustus 2021
29.	MARDHYAN SAPUTRA, A.Md	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Palembang	23 s.d. 25 Agustus 2021
30.	M. BUDIANTO, S.E.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Palembang	23 s.d. 25 Agustus 2021
31.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Mediatir Gel. 4 bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	23 Agustus s.d. 22 September 2021
32.	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN Angk. XI MARI	3 s.d. 10 September 2021
33.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penelitian dengan Judul "Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung"	23 September 2021
34.	RAHMAT JUNIANSYAH	Pelatihan Online Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kelas 13 MARI Tahun 2021	27 September 2021 s.d. 1 Oktober 2021
35.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia	4 s.d. 18 Oktober 2021
36.	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	Pelatihan Lanjutan Hak Asasi Manusia bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia Tahun 2021	24 Nopember s.d. 10 Desember 2021
37.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2017 dan PERMA 5 Tahun 2019	22 Nopember s.d. 2 Desember 2021

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TI



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2021 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401909/2021 dengan total pagu Dipa Awal sebesar Rp. 24.513.366.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang mana setelah di revisi menjadi Rp.23.626.430.000,-(Dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.402017/2021 dengan total pagu awal sebesar Rp. 73.904.000 (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan setelah direvisi menjadi Rp.183.940.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)-Revisi

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2021.

- Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	1066.EAA	Layanan Perkantoran				
1.	001	Gaji dan Tunjangan	3.699.971.000	3.488.909.080	211.061.920	94.30
2.	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	997.134.000	945.755.976	51.378.024	94.85

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	1066.EAC	Layanan Umum				
3.	052	Non Operasional Satker Daerah	12.700.000	12.616.890	83.110	99.35
	1071.EAD	Layanan Sarana Internal				
4.	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	25.000.000	25.000.000	0	100
5.	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.306.160.000	1.219.432.940	86.727.060	93.36
	1071.EAE	Layanan Prasarana Internal				
6.	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	17.585.465.000	17.424.724.101	160.740.899	99.08
		Total	23.626.430.000	23.116.439.030	509.990.970	97.84

2. DIPA Dirjen Badilum (03)-Revisi

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2021.

- Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				
1.	051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100
	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan				
2.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	69.770.000	69.763.400	6.600	99.99
3.	052	Penetapan Hari Sidang	21.000.000	19.250.000	1.750.000	91.67
4.	053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	24.390.000	24.190.000	200.000	99.18
5.	054	Minutasi/Upaya Hukum	16.500.000	16.500.000	0	100
6.	055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU & Terdakwa	14.200.000	14.000.000	200.000	98.59

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
7.	056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	10.700.000	10.500.000	200.000	98.13
8.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	1.500.000	1.400.000	100.000	93.33
9.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK	1.880.000	870.720	1.009.280	46.31
Total			183.940.000	180.474.120	3.465.880	98.12

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	Sertifikat masih proses balik nama
		Bangunan Gedung Kantor	Menggunakan bekas zetting platz PN. sekayu
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	Ada
		Ruang Wakil Ketua	Ada
		Ruang Hakim	Ada
		Ruang Panitera	Ada
		Ruang Panitera Muda	Semua Panmud dalam 1 (satu) Ruangan
		Ruang Panitera Pengganti	Digabung dalam 1 (satu) Ruangan
		Ruang Juru sita dan Juru Sita Pengganti	
		Ruang Sekretaris	Digabung dalam 1 (satu) Ruangan
		Ruang Kepala Sub Bagian	
Ruang Kesekretariatan			

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	Ada
		Ruang Penasihat Hukum	Tidak Ada
		Ruang Rapat	Tidak Ada
		Ruang Perpustakaan	Tidak Ada
		Ruang Arsip	Tidak Ada
		Ruang Gudang	Tidak Ada
		Ruang Server	Digabung dalam 1 (satu) Ruangan
		Ruang Toilet Pegawai	Ada
		Ruang Toilet Pegawai Hakim	Ada
		Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada Bagian Depan Gedung - Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	Ada
		Pos Jaga	Tidak Ada
		Tempat Parkir Kendaraan	Menumpang di lahan bekas Kantor Kacab Jari
		Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan Jalan Menggunakan <i>Paving Block</i>
		Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias
		Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 8 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i>
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Ruang Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Ruang Sidang (Ruang Sidang Utama dan Ruang Sidang Ramah Anak) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) di setiap Ruangnya - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain
		Ruang Tunggu Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas
		Ruang Tunggu Ramah Anak	Tidak Ada
		Ruang Tunggu PK, Bapas, Penasihat Hukum dan Pekerjaan Sosial	Tidak Ada
		Ruang Pos Pelayanan Hukum	Digabung dengan Ruangan Security
		Ruang Tahanan Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Tahanan Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Mediasi	Tidak Ada
		Ruang Kaukus	Tidak Ada
		Ruang Diversi	Tidak Ada
		Ruang Teleconference	Tidak Ada
		Ruang Laktasi	Tidak Ada
		Toilet Umum Pria	- Terdapat 1 Toilet Pria
		Toilet Umum Wanita	- Terdapat 1 Toilet Wanita
		Toilet Khusus Difabel	- Terdapat di Toilet Wanita
		Mushallah	Menggunakan Musholah Warga

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Dinas Ketua	0				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3.	Rumah Dinas Hakim	0				
4.	Rumah Dinas Panitera	0				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	0				

3. Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Wuling Cortez	1	1			
2.	Mitsubishi XPander	1	1			Sewa
3.	Nissan X-Trail	3		3		Pinjam Pakai Pemda
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Vario	1	1			
2.	Kawasaki Trail	1	1			

4. Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	AC Split	6	Unit
2.	UPS	4	Unit
3.	PC	18	Unit
4.	Laptop	5	Unit
5.	Printer	4	Unit

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2021 antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1

dengan *Bandwidth* sebesar 60 Mbps, Pengadaan Laptop bagi hakim dan Sewa Mesin Fotokopi guna mendukung *E-Court*.

- Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	<i>Dedicated</i> 1:1 60Mbps, Fiber
2.	Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
3.	Rak Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
4.	UPS	1	Server SIPP & perangkat komputer lainnya
5.	Komputer Jaringan Lainnya	2	
6.	Router	3	
7.	Hub	1	
8.	Network Cable Tester	1	

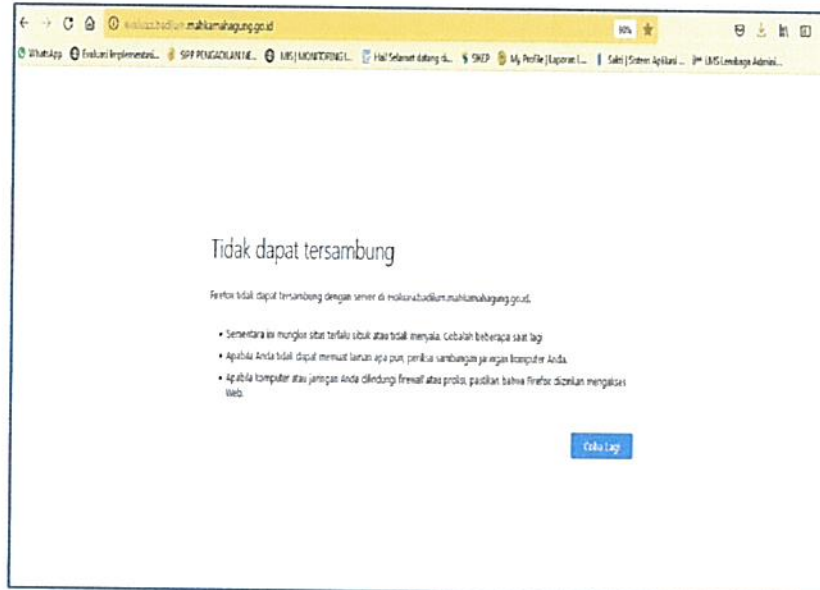
1. Implementasi E-Court

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah E-Court pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2021 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Daftar Melalui E-Court	Sepakat E-Court
1.	Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	33	18
2.	Permohonan	19	-
3.	Gugatan Sederhana	8	-

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sampai dengan bulan Desember tahun 2021 pada website Evaluasi Implementasi SIPP Dirjen Badilum masih mengalami gangguan, dikarenakan m dilakukan maintenance.



BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pada tahun 2021 telah dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Asessor dari Pengadilan Tinggi Palembang. Dari Surveillance tersebut terdapat beberapa kekurangan yang ditemui dan kedepannya direkomendasikan untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dari assessment yang dilakukan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat diusulkan meningkat menjadi predikat A "Excellent" yang sebelumnya mendapatkan nilai " B " .

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan November 2018. Pelayanan Umum dan seluruh pelayanan di Kepaniteraan di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di satu pintu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada masyarakat.



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

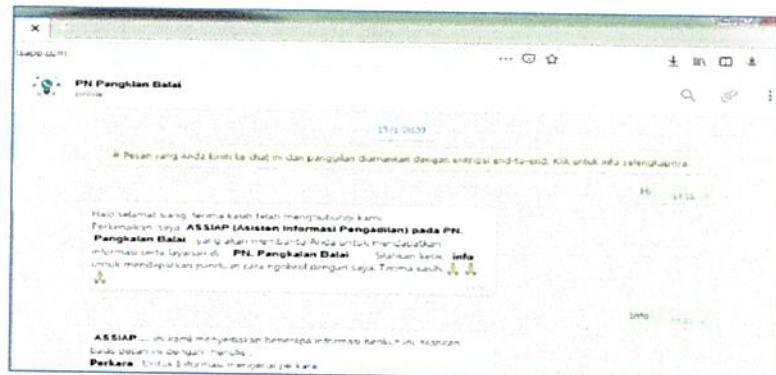
Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan beberapa inovasi. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

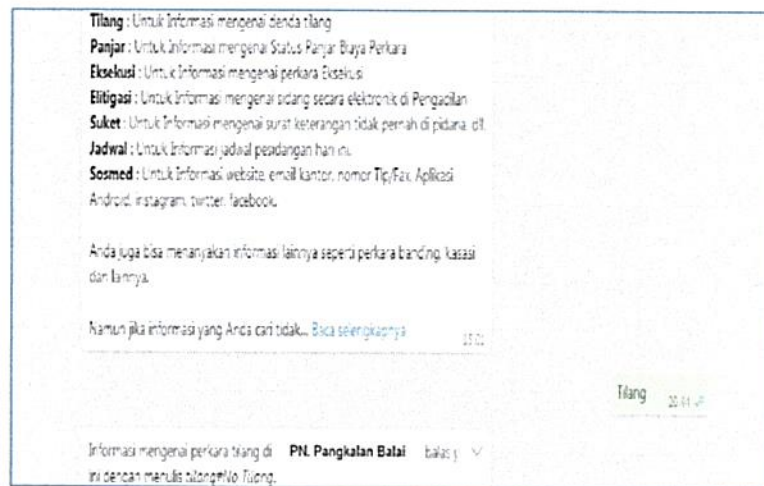
- a) Aplikasi ASSIAP (Asisten Informasi Pengadilan) merupakan sebuah Aplikasi berbasis aplikasi WhatsApp (WA) dengan

nomor 081274916659 yang dapat digunakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem informasi pengadilan untuk masyarakat pengguna jasa pelayanan Pengadilan, adapun manfaat dan informasi yang dapat di peroleh melalui aplikasi ASSIAP ini sebagai berikut:

1. Informasi Pengadilan di didapat secara REAL TIME;
2. Para Pihak dapat mengakses informasi Pengadilan yang dibutuhkan darimana saja;
3. Aplikasi ASSIAP lebih familiar dan mudah digunakan oleh setiap elemen masyarakat;
4. Jenis informasi yang dapat diperoleh:
 - Informasi Perkara
 - Informasi Panjar perkara
 - Informasi Denda Tilang
 - Informasi Surat keterangan
 - Informasi E-Litigasi
 - Informasi Eksekusi
 - Informasi Jadwal Sidang
 - Informasi Sosmed/ nomor kontak pengaduan/dll;

dan akan dikembangkan terus sesuai kebutuhan masyarakat nantinya.





b) Aplikasi ASDUMAS (Asisten Pengaduan Masyarakat) merupakan sebuah Aplikasi berbasis aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 082210009901 yang dapat digunakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem untuk masyarakat melakukan pengaduan.



- c) Aplikasi ASTASIKUM (Asisten Konsultasi Hukum) merupakan sebuah Aplikasi berbasis aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 082210009902 yang dapat digunakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem untuk masyarakat melakukan konsultasi hukum dimana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibiayai APBN untuk menyediakan layanan Konsultasi Hukum.



- d) Aplikasi E-TEIKWAN (Elektronik Teknologi Informasi Kepegawaian) merupakan aplikasi elektronik berbasis web digital untuk mengetahui data-data kepegawaian, seperti Surat Keputusan Ketua PN, Surat Izin, Surat Sakit, Surat Cuti, Surat Tugas, dan Surat Izin Keluar Kantor.



Arsip Surat Keputusan KPN

Cari:

Tampilkan: 10 baris

No	Tanggal	Nama SK	File SK
1	28-01-2021	SK Penunjukan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
2	25-01-2021	SK Pembentukan Tim Pengendalian Internal Kebersihan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021	Download
3	20-01-2021	SK Pelaksanaan Haras Tugas Panitia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
4	04-01-2021	SK Tim Penyusunan LK/JP LAPTAH IKU RENSTRA Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
5	04-01-2021	SK Susunan Pengurus PTWP Cabang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
6	04-01-2021	SK Koordinator dan Petugas Kebersihan Serta Keamanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
7	04-01-2021	SK Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
8	04-01-2021	SK Tim Penanggulangan Huru Hara dan Pengamanan Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
9	04-01-2021	SK Penunjukan Tim Evaluasi dan Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Honorar di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download
10	04-01-2021	SK Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Download

e) Aplikasi SANTRI (Sistem Antrian Terintegrasi) merupakan aplikasi Antrian persidangan yang berbasis data base server.

Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
 Hari Rabu 07 April 2021

LOKET 1
PELAYANAN PIDANA

A-

CEK ANTRIAN

LOKET 2
PELAYANAN PERDATA

B-

CEK ANTRIAN

LOKET 3
PELAYANAN HUKUM

C-

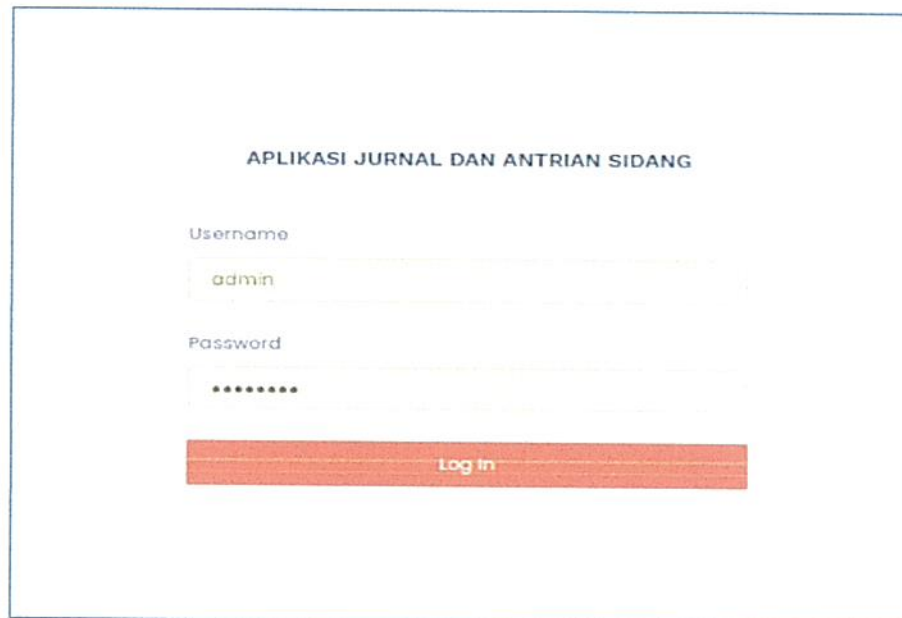
CEK ANTRIAN

LOKET 4
PELAYANAN UMUM

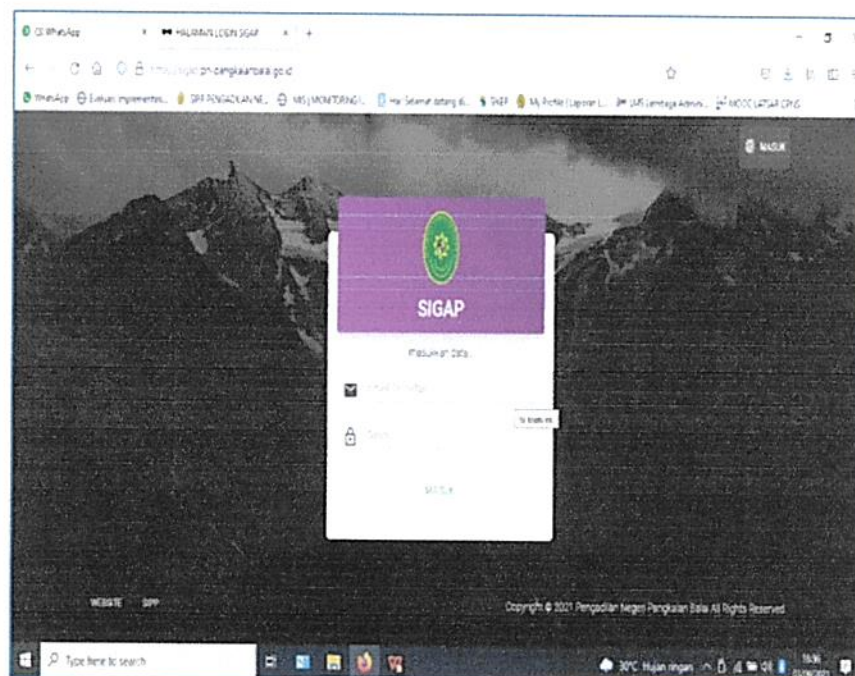
D-

CEK ANTRIAN

Copyright © 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



- f) Aplikasi SIGAP (Sita, Geledah dan Penahanan) merupakan aplikasi yang terhubung dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang mana memudahkan mereka dalam pengiriman permohonan atau pengajuan sita, geledah dan penahanan secara elektronik berbasis web.





- g) Aplikasi E-MINATOR (Elektronik Permintaan Alat Tulis Kantor) merupakan inovasi yang dipergunakan untuk melakukan permintaan alat tulis kantor secara elektronik berbasis Google Form.

BAB VI

PENGAWASAN



BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U10/105/KP.04.6/VII/2021 Tanggal : 2 Juli 2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Bidang Pengawasan
1.	Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H	Koordinator Pengawas Bidang
2.	Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.	Hukum
3.	Dwi Novita Purbasari, S.H.	Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	M. Alwi, S.H.	SIPP
5.	Syarifa Yana, S.H.	Umum dan Keuangan
6.	Agewina, S.H.	Kepegawaian & ortala
7.	Erwin Tri Surya A., S.H.	Pidana dan PTSP
8.	Ayu Cahyani, S.H.	Perdata

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada setiap bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2021 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing -masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.



Rapat evaluasi hakim pengawas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

BAB VII

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada secara maksimal
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan Hakim,

Pegawai dan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

LAMPIRAN





**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 3111/SEK/OT 01.1/12/2021 Jakarta, 13 Desember 2021
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2021

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala / Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Satker Eselon I Mahkamah Agung RI menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Eselon II di Bawahnya;
2. Pengadilan Tingkat Banding menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya;
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan *outline* terlampir;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 diserahkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung dalam bentuk *soft copy* melalui email : renogevlap2@gmail.com paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari 2022, sedangkan dalam bentuk hard copy pada minggu keempat bulan Januari 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,


Hasbi Hasan

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	Pendahuluan
Bab II	A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum / Agama / Militer - Keadaan Perkara Tingkat Pertama - Keadaan Perkara Tingkat Banding - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali B. Penyelesaian Perkara - Jumlah sisa perkara yang diputus - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) - Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) - Sidang keliling / pelayanan terpadu – - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)
Bab III	Sumber Daya Manusia Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan - Mutasi - Promosi Pensiun - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)
Bab IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi A. Pengelolaan Keuangan B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana C. Pengelolaan Teknologi Informasi - Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum / Agama / Militer - Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum / Agama / Militer
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik - Akreditasi Penjaminan Mutu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Inovasi Pelayanan Publik
Bab VI	Pengawasan A. Internal B. Evaluasi
Bab VII	Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-masing

Lampiran 2
Surat Sekretaris Mahkamah Agung,
Nomor : 3111/SEK/OT 01.1/12/2021
Tanggal : 13 Desember 2021

JADWAL PENYERAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN	KET
1.	Januari Minggu Kedua	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Pengadilan Tingkat Pertama telah diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding.- Eselon II menyerahkan soft copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan ke Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Eselon I mengkompilasi Laporan laporan Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung RI.	
2.	Januari Minggu Ketiga	<ul style="list-style-type: none">- Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-laporan dari Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya.- Eselon I mengkompilasi laporan-laporan dari masing-masing Eselon II.- Rekapitulasi yang sudah atau belum mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan akan ditampilkan pada Website masing-masing Tingkat Banding maupun Eselon I Mahkamah Agung.	
3.	Januari Minggu Keempat	<ul style="list-style-type: none">- Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi melalui Biro Perencanaan dan Organisasi lewat email renogevlap2@gmail.com- Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Pusat mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Eselon I yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi melalui Biro perencanaan dan Organisasi lewat email renogevlap2@gmail.com	
4.	Februari Minggu Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hard copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tingkat Banding (yang sudah dikompilasi) dikirimkan ke Badan Urusan Administrasi c.q. Biro perencanaan dan Organisasi.- Penyampaian hard copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.- Rekapitulasi yang sudah atau yang belum mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan akan ditampilkan pada website Mahkamah Agung RI.	



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL.JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TELP.(0711) 311666, 352900 FAX.(0711) 311666
Website : <http://pt-palembang.go.id> Email : renprog.ang.ptplg@gmail.com

PALEMBANG

Palembang, 28 Desember 2021

Nomor : W6-/5043/OT.01.1/XII/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 perihal tersebut pada pokok surat dan dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2017 tentang pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), selanjutnya diminta kepada setiap satuan kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang agar mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dalam bentuk *hardcopy* ke Pengadilan Tinggi Palembang dan *softcopy* melalui *email* renprog.ang.ptplg@gmail.com **paling lambat tanggal 10 Januari 2022**. Mengingat pentingnya data-data pendukung tersebut diharapkan dapat kami terima tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


Dr. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
3. Kepala Badan Pegawasan Mahkamah Agung RI di-Jakarta.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di-Jakarta.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/1/KP.04.6/II/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LKjIP /LAPTAH/ IKU/ RENSTRA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
 - b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LKJIP/LAPTAH/IKU/RENSTRA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



SILVI ARIANI, S.H., M.H.

NIP. 19760929 200112 2 006

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W6-U10/1/KP.04.6/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	5
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2.	YUSUF, S.H.	Panitera	Ketua Tim	
3.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Anggota	
8.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI


SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24,513,366,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,693,741,000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		4,688,741,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,688,741,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			26,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	22,509	22,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			100,174,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,683,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
C	<u>Pemeliharaan Kantor</u>			171,650,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu)			119,250,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	800.0 M2	149,063	119,250,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			52,400,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 THN	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000	
	- Perawatan Komputer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UNIT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UNIT	300,000	1,500,000	
D	<u>Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor</u>			72,040,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu)			50,040,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			22,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Honorar/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [30 ORG x 1 STEL]	30.0 STEL	600,000	18,000,000	
E	<u>Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding</u>			29,400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			29,400,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 7 KEG]	56.0 OH	300,000	16,800,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 7 KEG]	28.0 OK	100,000	2,800,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 7 KEG]	28.0 OH	350,000	9,800,000	
F	<u>Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA</u>			18,900,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			18,900,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 9 KEG]	18.0 OK	100,000	1,800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 9 KEG]	36.0 OH	300,000	10,800,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 9 KEG]	18.0 OH	350,000	6,300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			988,770,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>274,320,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			242,320,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,330,000	27,960,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	2,330,000	55,920,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	2,330,000	139,800,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	2,330,000	2,330,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	2,330,000	4,660,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	2,330,000	11,650,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			27,000,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	900,000	27,000,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>279,630,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			193,000,000	RM
	- Web hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 THN	156,000,000	156,000,000	
	- Tambahan Langganan Internet	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu)			60,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.24,513,366,000

Halaman : 4

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
G 521119	Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu) - Tes Urin [45 ORG x 1 KEG]	45.0 ORG	150,000	6,750,000 6,750,000	RM
H 522141	Hak Keuangandan Fasilitas Hakim Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 ORG x 1 THN]	9.0 OT	15,120,000	136,080,000 136,080,000	RM
1066.EAC	Layanan Umum[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 Layanan		5,000,000	
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 052 Non Operasional Satker Daerah	1.0 Layanan		5,000,000	
A 521241	Penanggulangan Covid-19 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan APD/Alat UjiMedis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	RM
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			19,819,625,000	
1071.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	3.0 unit		1,331,160,000	
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal 052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3.0 Layanan		1,331,160,000	
A 532111	Pengadaan Lanjutan PC Kepaniteraan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan PC Kepaniteraan	2.0 Unit	12,500,000	25,000,000 25,000,000	RM
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran A Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1,306,160,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 set	1,306,160,000	1,306,160,000	RM
1071.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 unit		18,488,465,000	
1071.EAE.001	Layanan Prasarana Internal 051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	1.0 m2		18,488,465,000	
A 533111	Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Satker Baru Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu) - Fisik - Perencana - Pengawas - Pengelola Kegiatan	1997.0 m2 1.0 keg 1.0 keg 1.0 keg	8,682,556 146,905,000 786,496,000 216,000,000	17,339,064,000 146,905,000 786,496,000 216,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 4 Januari 2022

Endang Efendi
 NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA REV-XII)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.23,626,430,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			279,237,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	279,237,000	279,237,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			997,134,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>				
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			275,292,000	
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,330,000	27,960,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	2,330,000	55,920,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	2,330,000	139,800,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	2,330,000	2,330,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	2,330,000	4,660,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	2,330,000	11,650,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjiliran, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			27,972,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	932,400	27,972,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>				
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			278,658,000	
	- Web hosting	1.0 THN	3,028,362	3,028,000	
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 THN	156,000,000	156,000,000	
	- Penambahan Instalasi dan Jaringan Internet	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu)			56,400,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	4,700,000	56,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,900,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	825,000	9,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA REV-XII)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.23,626,430,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu)			8,700,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	725,000	8,700,000	
C	Pemeliharaan Kantor			171,650,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			119,250,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	800.0 M2	149,063	119,250,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			52,400,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 THN	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000	
	- Perawatan Komputer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UNIT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UNIT	300,000	1,500,000	
D	Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor			80,404,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu)			42,340,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	100,000	100,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			38,064,000	RM
	- Tambahan Seragam Dinas	32.0 STEL	502,000	16,064,000	
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [30 ORG x 1 STEL]	30.0 STEL	600,000	18,000,000	
E	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			34,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			34,400,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 9 KEG]	72.0 OH	300,000	21,600,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 11 KEG]	44.0 OK	100,000	4,400,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 6 KEG]	24.0 OH	350,000	8,400,000	
F	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA			13,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA REV-XII)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.23,626,430,000

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			13,900,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 8 KEG]	16.0 OK	100,000	1,600,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 9 KEG]	18.0 OH	350,000	6,300,000	
G	Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba			6,750,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			6,750,000	RM
	- Tes Urin [45 ORG x 1 KEG]	45.0 ORG	150,000	6,750,000	
H	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim			136,080,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			136,080,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 ORG x 1 THN]	9.0 OT	15,120,000	136,080,000	
1066.EAC	Layanan Umum[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 Layanan		12,700,000	
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1.0 Layanan		12,700,000	
052	Non Operasional Satker Daerah			12,700,000	
A	Penanggulangan Covid-19			12,700,000	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			12,700,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	12,700,000	12,700,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			18,916,625,000	
1071.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	3.0 unit		1,331,160,000	
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan		1,331,160,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			25,000,000	
A	Pengadaan Lanjutan PC Kepaniteraan			25,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			25,000,000	RM
	- Pengadaan PC Kepaniteraan	2.0 Unit	12,500,000	25,000,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			1,306,160,000	
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1,306,160,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			1,306,160,000	RM
	- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 set	1,306,160,000	1,306,160,000	
1071.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 unit		17,585,465,000	
1071.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		17,585,465,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			17,585,465,000	
A	Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Satker Baru			17,585,465,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA REV-XII)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.23,626,430,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			17,585,465,000	RM
	- Fisik	1997.0 m2	8,230,378	16,436,064,000	
	- Perencana	1.0 keg	146,905,000	146,905,000	
	- Pengawas	1.0 keg	786,496,000	786,496,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 keg	216,000,000	216,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 4 Januari 2022

Endang Efendi
 NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.73,904,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73,904,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]			73,904,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN	100.0 Perkara		49,904,000	
1049.BCA.073	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Palembang	100.0 Perkara		49,904,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			10,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			10,000,000	
521211	Belanja Bahan			10,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Penggandaan dan penjilitan berkas	100.0 PKR	10,000	1,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Alat tulis kantor	100.0 PKR	90,000	9,000,000	
052	Penetapan Hari Sidang			9,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,000,000	U
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman penetapan hari sidang	200.0 OK	70,004	14,000,000	
054	Minutasi/Upaya Hukum			14,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	U
521211	Belanja Bahan			3,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			3,000,000	RM
	- Penggandaan dan penjilitan berkas perkara	100.0 PKR	30,000	3,000,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			3,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			15,500,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [50 OK]	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			14,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,270,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			5,270,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	50.0 OK	20,000	1,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,000,000	
	(KPPN.160-Sekayu)			4,270,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan	61.0 OK	70,000	4,270,000	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			4,270,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,000,000	U
				1,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (PAGU AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.73,904,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			300,000	RM
	- Pengiriman berkas banding	10.0 PKR	30,000	300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			700,000	RM
	- Pemberitahuan putusan banding kepada jaksa/terdakwa	5.0 PKR	70,000	350,000	
	- Pemberitahuan proses banding kepada jaksa/terdakwa	5.0 PKR	70,000	350,000	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			1,134,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,134,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			400,000	RM
	- Pengiriman berkas kasasi dan Peninjauan kembali	5.0 PKR	80,000	400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			734,000	RM
	- Pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	6.0 PKR	64,000	384,000	
	- Pemberitahuan proses kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	5.0 PKR	70,000	350,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	40.0 Orang		24,000,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	40.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Belanja Jasa konsultan [1 ORG x 2 JAM x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 4 Januari 2022

Endang Efendi
 NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (REV IV)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.183,940,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			183,940,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			183,940,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	550.0 Perkara		159,940,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.073	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Palembang	550.0 Perkara		159,940,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			69,770,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			69,770,000	
521211	Belanja Bahan			5,750,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penggandaan dan penjilitan berkas	575.0 PKR	10,000	5,750,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			64,020,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat tulis kantor	660.0 PKR	97,000	64,020,000	
052	Penetapan Hari Sidang			21,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			21,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			21,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman penetapan hari sidang	300.0 OK	70,000	21,000,000	
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			24,390,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,390,000	
521211	Belanja Bahan			24,390,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	13.0 OK	30,000	390,000	
	- Konsumsi Pengamanan Persidangan	800.0 OK	30,000	24,000,000	
054	Minutasi/Upaya Hukum			16,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			16,500,000	
521211	Belanja Bahan			16,500,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penggandaan dan penjilitan berkas perkara	550.0 PKR	30,000	16,500,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			14,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			200,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [10 OK]	10.0 OK	20,000	200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [200 OK]	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			10,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			10,700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			200,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	10.0 OK	20,000	200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (REV IV)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.183,940,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			10,500,000	RM
057	- Pengiriman penahanan dan perpanjangan penahanan	150.0 OK	70,000	10,500,000	
A	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			1,500,000	U
	TANPA SUB KOMPONEN			1,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			100,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	5.0 PKR	20,000	100,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,400,000	RM
	- Pemberitahuan putusan banding kepada jaksa/terdakwa	10.0 OK	70,000	700,000	
058	- Pemberitahuan proses banding kepada jaksa/terdakwa	10.0 OK	70,000	700,000	
A	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			1,880,000	U
	TANPA SUB KOMPONEN			1,880,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			480,000	RM
	- Pengiriman berkas kasasi dan Peninjauan kembali	6.0 PKR	80,000	480,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,400,000	RM
	- Pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	10.0 OK	70,000	700,000	
	- Pemberitahuan proses kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	10.0 OK	70,000	700,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	40.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	40.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Belanja Jasa konsultan [1 ORG x 2 JAM x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 4 Januari 2022

Endang Efendi
 NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 (DIPA REV-XII)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.23,626,430,000

Halaman: 1

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			23,626,430,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,709,805,000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		4,697,105,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,697,105,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,971,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			29,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	25,000	25,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			109,539,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	95,147,000	95,147,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,783,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,163,000	24,163,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,392,490,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,235,122,000	1,235,122,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II
TAHUN 2020**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN II TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
klas IB dan II berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi
Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dalam rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2021 adalah
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


PRIM HARYADI

Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021
TANGGAL 10 Maret 2021**

NO.	NAMA PENGADILAN	KLAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2020	PREDIKAT
1 s/d 90	dst.				
91	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	II	500	695	B
92 s/d 304	dst.				


**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/ 105 /KP.04.6/VIII/2021

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran dan terkontrol nya Administrasi kantor Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-U10/62/KP.04.6/I/2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Kedua** : Menetapkan Susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang baru, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Keenam

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 02 Juli 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SILVI ARIANI, SH., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR : W6-U10/ 105 /KP.04.6/VII/2021

TANGGAL : 02 Juli 2021

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. NIP. 19781125 200212 2 002	PEMBINA / (IV/a)	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. NIP. 19880620 201101 1 006	PENATA / (III/c)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
3.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H. NIP. 19900220 201712 1 006	PENATA MUDA (III/a)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA 2. HAKIM PENGAWAS PTSP
4.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H. NIP. 19930604 201712 2 002	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
5.	DWI NOVITA PURBASARI, S.H. NIP. 19871122 201101 2 016	PENATA / (III/c)	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
6.	SYARIFA YANA, S.H. NIP. 19870115 201712 2 001	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
7.	AGEWINA, S.H. NIP. 19880521 201712 2 001	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA


KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SILVI ARIANI, SH., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006